



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402
SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **45** /PB/2020 21 Januari 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Yth. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Instansi Pembina telah menerbitkan Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN (Pengumuman Terlampir).
2. Adapun periode pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan pada periode :
 - a. Periode I : 27 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020
 - b. Periode II : 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020
 - c. Periode III : 1 Juli 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan Pengumuman dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk dapat mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN.
4. Apabila terdapat pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi penyesuaian/*inpassing* dimaksud, Bapak/Ibu dapat menghubungi Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui telepon: (021) 3449230 (psw. 5307) atau e-mail: jafung.perbendaharaan@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Andin Hadiyanto

Lampiran Surat
Nomor : S- 45 /PB/2020
Tanggal : 21 Januari 2020

Yth. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kejaksaan Agung
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
10. Kementerian Sekretariat Negara
11. Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Luar Negeri
13. Kementerian Pertahanan
14. Kementerian Keuangan
15. Kementerian Hukum Dan HAM
16. Kementerian Pertanian
17. Kementerian Perindustrian
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Perhubungan
20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kementerian Kesehatan
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Ketenagakerjaan
24. Kementerian Sosial
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan
27. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28. Kementerian Pariwisata
29. Kementerian BUMN
30. Kementerian Riset dan Teknologi (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
31. Kementerian Perdagangan
32. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
33. Kementerian Komunikasi dan Informatika
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
39. Kementerian Pemuda dan Olahraga
40. Sekretariat Kabinet RI
41. Arsip Nasional Republik Indonesia
42. Badan Ekonomi Kreatif
43. Badan Informasi Geospasial
44. Badan Intelijen Negara
45. Badan Keamanan Laut RI
46. Badan Kepegawaian Negara
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Badan Koordinasi Penanaman Modal
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50. Badan Narkotika Nasional

51. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
52. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
53. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
54. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
55. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
56. Badan Pengawas Nuklir
57. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
58. Badan Pengawas Pemilihan Umum
59. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60. Badan Pusat Statistik
61. Badan SAR Nasional
62. Badan Standardisasi Nasional
63. Badan Tenaga Nuklir
64. Dewan Ketahanan Nasional
65. Dewan Perwakilan Daerah
66. Lembaga Administrasi Negara
67. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
68. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah
69. Lembaga Ketahanan Nasional
70. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
71. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
72. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
73. Lembaga Sandi Negara
74. Komisi Pemberantasan Korupsi
75. Komisi Pemilihan Umum
76. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
77. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
78. Komisi Yudisial Republik Indonesia
79. Mahkamah Konstitusi
80. Ombudsman Indonesia
81. Perpustakaan Nasional RI
82. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan